

Jakarta: Kota Megah dengan Jurang Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Jakarta: A Grand City with a Deep Divide in Social and Economic Inequality

Graciovyn Christiano Tupan¹

¹ Marketing Komunikasi, Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

Wilbert²

² Marketing Komunikasi, Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

Maureen Xaviera Sisley³

³ Marketing Komunikasi, Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

Netta Wijaya⁴

⁴ Marketing Komunikasi, Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

Klarissa⁵

⁵ Marketing Komunikasi, Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

Scherika Tanaka⁶

⁶ Marketing Komunikasi, Faculty of Digital Communication and Hotel & Tourism, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

Kiky Soraya⁷

⁷ Sastra Inggris, Faculty of Humanities, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

Sukron Ma'Mun⁸

⁸ Teknik Informatika, School of Information Systems, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

ABSTRACT

ABSTRAK

Jakarta Barat, sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jakarta, memperlihatkan dinamika sosial ekonomi yang kompleks dengan ketimpangan yang nyata dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, teknologi digital, pekerjaan, dan kepemilikan aset. Penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut melalui metode kualitatif dengan wawancara langsung kepada warga dari berbagai kelas sosial: pelayan restoran, pegawai kantor, dan pemilik usaha kafe. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam kesempatan dan kualitas hidup antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, yang berdampak pada terbatasnya mobilitas sosial serta kerentanan ekonomi di kalangan masyarakat kurang mampu. Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor paling mendesak untuk diperbaiki demi menciptakan kesetaraan kesempatan. Dalam upaya menanggulangi persoalan ini, diperlukan kolaborasi antara

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 17-06-2025

Direvisi 18-08-2025

Disetujui 19-08-2025

Terpublikasi 19-08-2025

*Korespondensi:

Nama: maureen Xaviera
sisley

E-mail:

maureen.xs1008@gmail.com

*E-ISSN : 2622-6898

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Rekomendasi solusi mencakup peningkatan kualitas layanan publik, pemberian subsidi pendidikan dan kesehatan, perluasan akses teknologi, serta pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 10, yang menekankan pentingnya pengurangan ketimpangan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Jakarta Barat.

Kata Kunci: Ketimpangan sosial, akses layanan publik, Jakarta Barat, SDG 10, pemberdayaan ekonomi

ABSTRACT

West Jakarta, as part of the Jakarta metropolitan area, illustrates a complex socio-economic dynamic marked by stark inequalities in access to basic services such as education, healthcare, digital technology, employment, and asset ownership. This study examines these disparities through qualitative research, utilizing direct interviews with residents from diverse social classes: a restaurant worker, an office employee, and a business owner. The findings reveal significant gaps in opportunities and living conditions between high-income and low-income groups, which result in limited social mobility and persistent economic vulnerability among underprivileged communities. The study highlights education and healthcare as the most urgent sectors requiring improvement to promote equal opportunities. To address this issue, collaboration among the government, the private sector, and civil society is essential. The recommendations include improving public service quality, providing education and health subsidies, expanding technology access, and implementing community-based economic empowerment programs. This research supports Sustainable Development Goal (SDG) 10 by emphasizing the importance of reducing inequality for building a fairer, more inclusive, and sustainable society in West Jakarta.

Keywords: social inequality, access to public services, West Jakarta, SDG 10, economic empowerment

Pendahuluan

Pada level makro-ekonomi, data resmi BPS DKI Jakarta menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di DKI sempat turun pada Maret 2023 (dalam rangka penurunan 0,17% secara keseluruhan), namun ketimpangan sosial justru mengalami kenaikan: indeks Gini naik sebesar 0,019 poin menjadi 0,431. Artinya, jurang antara kelompok berpengeluaran tinggi dan rendah semakin melebar — di tengah situasi menurunnya kemiskinan, sebagian kecil masyarakat mendapat manfaat ekonomi jauh lebih banyak ketimbang mayoritas.

Pada tingkat lokal di Jakarta Barat dan wilayah pesisir, ketimpangan sosial tampak dalam akses terbatas terhadap ruang publik dan hunian yang layak. Kawasan elit yang berkembang, misalnya lahan hasil reklamasi di pesisir, sebagian besar dialokasikan untuk hunian miliaran rupiah dan embeddin (Praja et al., 2023) privatisasi pantai. Sementara itu, ruang publik seperti taman, waduk, dan pantai umum yang semestinya inklusif justru makin terbatas atau berbayar, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah semakin terpinggirkan dan kesulitan mengakses fasilitas dasar dan ruang sosial.

Sebagai bagian dari wilayah metropolitan (friahtmad, 2024). Jakarta, Jakarta Barat menunjukkan kehidupan sosial dan ekonomi yang rumit. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, Jakarta Barat menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan, terlihat dari perbedaan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan kesempatan kerja. Sebagian masyarakat menikmati peluang ekonomi tinggi, sementara sebagian lain masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar (Riantiarno et al., 2024). Perbedaan ini menciptakan jurang sosial yang mempengaruhi stabilitas sosial, ketahanan keluarga, dan mobilitas sosial generasi muda.

Pengangkatan masalah kesenjangan sosial dan ekonomi di Jakarta Barat sangat menarik untuk diteliti karena wilayah ini menunjukkan kontras antara kemajuan pembangunan dan kondisi sosial masyarakat yang masih jauh dari kata merata. Meskipun pertumbuhannya pesat, akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan kesempatan pekerjaan masih sangat berbeda antar kelompok masyarakat. Ketimpangan ini berdampak pada stabilitas sosial, ketahanan keluarga, dan mobilitas sosial generasi muda, serta meskipun tingkat kemiskinan menurun, jurang sosial yang ada semakin melebar. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat isu ini agar mendorong kolaborasi dan solusi yang inklusif demi pemerataan kesejahteraan di Jakarta Barat.

\

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik wawancara, suatu metode yang akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data serta informasi tentang subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara pribadi antara peneliti dan responden, memberikan informasi kualitatif yang dapat memberikan penjelasan mendalam tentang masalah penelitian.

Wawancara dilakukan di Jakarta Barat, sebagai bagian dari proyek ini. Peneliti melakukan wawancara dengan individu yang mengalami kesenjangan sosial dan ekonomi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi sosial ekonomi mereka. Mereka yang mengikuti wawancara ini berasal dari berbagai kelompok usia dan kelas sosial yang berbeda.

Metode wawancara dipilih karena memiliki keunggulan dalam menggali informasi secara langsung, mendalam, dan kontekstual. Metode ini mampu mengungkap persepsi, pengalaman subjektif, serta latar belakang yang melatarbelakangi pendapat para narasumber terkait isu sosial dan ekonomi.

Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bersifat generik atau *template*, tetapi dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman nyata narasumber dalam konteks kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pekerjaan.

Terdapat tiga orang narasumber dalam penelitian ini, ketiganya dipilih secara sengaja berdasarkan kelas sosial yang berbeda, yaitu:

- Satu orang dari kelas bawah (Pelayan Restoran)
- Satu orang dari kelas menengah (Pegawai Kantoran)
- Satu orang dari kelas atas (Pemilik Usaha Kafe)

Pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan keragaman perspektif dan representasi sosial yang luas, sehingga dapat ditarik gambaran yang lebih menyeluruh tentang dampak kesenjangan sosial dan ekonomi dari berbagai sudut pandang.

Data dikumpulkan melalui wawancara langsung (*tatap muka/face to face*) yang dilakukan di area Jakarta Barat. Lokasi ini dipilih karena, lokasi ini merupakan kawasan yang mencerminkan campuran antara masyarakat kelas bawah hingga menengah-atas. Proses wawancara dilakukan secara personal dan privat demi kenyamanan dan kerahasiaan narasumber.

Secara umum, narasumber dalam penelitian ini menunjukkan sikap yang terbuka dan *open-minded* selama proses wawancara. Dengan percaya diri mereka menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka dengan jujur, sehingga menghasilkan daya yang kaya akan informasi kontekstual.

Hasil

Berdasarkan pendapat para responden dan berdasar atas rumusan masalah 1, masyarakat di Jakarta Barat merasakan berbagai bentuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Dalam hal akses kesehatan, ketiganya sepakat bahwa terdapat kesenjangan yang jelas antara masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang lebih mampu secara finansial. Warga dengan penghasilan rendah harus bergantung pada layanan kesehatan publik yang sering kali padat, lambat, dan kurang nyaman. Sementara itu, kelompok masyarakat dengan daya beli lebih tinggi dapat langsung mengakses layanan kesehatan swasta yang cepat dan memadai. Hal ini membuat banyak orang dari kalangan bawah menunda pengobatan karena khawatir akan biaya dan proses pelayanan.

Dalam akses pendidikan, ketimpangan juga terasa sangat kuat. Kaka Hengki, Kak Yanti, dan Kaka Natasha melihat bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas. Sekolah negeri yang menjadi andalan mereka cenderung memiliki fasilitas dan sistem pembelajaran yang kurang optimal dibanding sekolah swasta. Akibatnya, anak-anak ini kesulitan untuk bersaing di masa depan karena tidak memiliki fondasi pendidikan yang setara.

Akses terhadap teknologi juga menjadi persoalan penting yang dirasakan oleh para responden. Perangkat digital dan koneksi internet cepat masih dianggap sebagai barang mewah oleh sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini berdampak pada terbatasnya kesempatan belajar, bekerja, dan mengakses informasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Di sektor lapangan kerja, ketiganya menyampaikan bahwa peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan stabil masih sangat terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau koneksi tertentu. Kaka Hengki secara khusus menyoroti terbatasnya mobilitas sosial di dunia kerja, di mana orang-orang dari kelas bawah sulit untuk berkembang atau naik jabatan.

Kesenjangan dalam pendapatan juga menjadi masalah serius. Para responden merasa bahwa meskipun mereka telah bekerja keras, penghasilan yang diperoleh masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk menabung atau berinvestasi. Hal ini menyebabkan tekanan ekonomi yang terus-menerus dirasakan oleh keluarga berpenghasilan rendah.

Terakhir, kesenjangan dalam hal kekayaan juga sangat terasa. Aset dan properti hanya dapat dimiliki oleh segelintir orang yang lebih mampu, sementara masyarakat kecil sulit memiliki pegangan ekonomi jangka panjang. Akibatnya, mereka cenderung hidup dalam ketidakpastian dan tanpa rasa aman finansial.

Selanjutnya berdasarkan rumusan masalah 2 yaitu kesenjangan yang terjadi di berbagai sektor tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat di Jakarta Barat. Dalam hal kesehatan, ketimpangan akses membuat banyak orang dari kalangan bawah menunda pengobatan, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Pelayanan publik yang lambat dan mahal memperbesar risiko kesehatan bagi masyarakat miskin.

Dalam sektor pendidikan, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan anak-anak dari keluarga kurang mampu kesulitan bersaing dalam dunia kerja maupun dalam pengembangan diri. Mereka tidak hanya tertinggal dalam aspek akademik, tetapi juga dalam kemampuan membangun masa depan yang lebih baik.

Keterbatasan akses terhadap teknologi memperparah ketimpangan. Masyarakat yang tidak memiliki perangkat digital atau koneksi internet memadai akan tertinggal dalam mendapatkan informasi, mengikuti pendidikan daring, atau mencari peluang pekerjaan secara online.

Dalam dunia kerja, kesenjangan menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan layak. Ini menyebabkan banyak orang bekerja dalam sektor informal dengan penghasilan rendah dan tanpa jaminan sosial.

Kesenjangan pendapatan yang lebar memperburuk kondisi ekonomi keluarga kecil. Dengan penghasilan yang terbatas, mereka tidak memiliki ruang untuk menabung atau memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Hal ini berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi rumah tangga dan mempersempit peluang untuk meningkatkan taraf hidup.

Dampak kesenjangan kekayaan juga sangat terasa. Tanpa akses terhadap aset atau investasi, masyarakat kecil tidak memiliki jaminan masa depan yang aman. Mereka hidup dari hari ke hari, dengan beban ekonomi yang terus menghantui dan membatasi kemampuan untuk berkembang.

Menurut ketiga responden mengenai rumusan masalah 3, sektor yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek ini dinilai sebagai fondasi utama untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Mereka berharap ada langkah nyata dari pihak yang berwenang, khususnya pemerintah, untuk memperbaiki layanan dasar ini.

Kaka Hengki secara khusus mengharapkan pemerintah yang aktif dan kolaboratif dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, inklusif, dan mampu menjangkau masyarakat kecil. Kak Yanti berharap adanya solidaritas dari masyarakat sekitar, serta dukungan konkret dari pemerintah, agar masyarakat miskin bisa hidup lebih layak dan mandiri. Kaka Natasha menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan sistem pendidikan dan kesehatan yang adil, sebagai jalan untuk memberi semua orang kesempatan yang sama dalam hidup.

Perubahan yang diharapkan oleh para responden mencakup peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah, serta kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada masyarakat bawah. Mereka ingin melihat masyarakat kecil tidak hanya bisa bertahan hidup, tetapi juga berkembang dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan tiga responden yang berasal dari latar belakang pekerjaan berbeda di Jakarta Barat—pegawai kantor, pelayan restoran, dan pemilik kafe—tergambar jelas bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan kenyataan sehari-hari yang dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Meskipun latar belakang mereka berbeda, semua responden menyoroti dua aspek utama yang paling signifikan dan mendesak untuk diperbaiki, yaitu akses terhadap kesehatan dan pendidikan.

Akses layanan kesehatan menjadi isu paling nyata, di mana masyarakat berpenghasilan rendah harus menghadapi fasilitas publik yang padat, waktu tunggu yang lama, dan ketidakpastian pelayanan. Hal ini menyebabkan keterlambatan penanganan penyakit dan menurunnya kualitas hidup. Di sisi lain, mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan swasta yang cepat dan nyaman. Ketimpangan ini memperlihatkan bagaimana sistem kesehatan saat ini masih belum inklusif dan belum mampu menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori keadilan sosial John Rawls, yang menekankan pentingnya prinsip pemerataan manfaat sosial dasar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, ketimpangan dalam layanan kesehatan mencerminkan ketidakhadiran prinsip *difference principle* Rawls, yaitu bahwa

ketimpangan hanya dapat diterima jika memberi keuntungan bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Kesenjangan pendidikan juga menjadi perhatian utama. Pendidikan merupakan pondasi mobilitas sosial dan ekonomi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki fasilitas belajar yang memadai dan sulit bersaing secara akademis. Ketimpangan ini bukan hanya membatasi kesempatan di masa kini, tetapi juga memperkuat rantai kemiskinan lintas generasi.

Hal ini sejalan dengan teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu, yang menjelaskan bagaimana institusi pendidikan secara tidak langsung mewariskan ketimpangan melalui cultural capital (modal budaya) dan habitus. Anak-anak dari kelas bawah memiliki keterbatasan dalam mengakses modal budaya seperti dukungan belajar di rumah, jaringan sosial, atau ekspektasi akademis dari lingkungan. Akibatnya, sistem pendidikan justru mereproduksi struktur sosial yang timpang alih-alih menjembatani kesenjangan.

Selain itu, akses terhadap teknologi, kesempatan kerja, pendapatan, dan kekayaan juga turut memperkuat struktur ketimpangan yang ada. Kurangnya perangkat digital dan internet memadai menghalangi masyarakat dalam mendapatkan informasi, mengikuti perkembangan zaman, dan meraih peluang ekonomi baru. Pekerjaan yang tersedia pun cenderung berpenghasilan rendah dan minim prospek, sehingga usaha keras tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sosial dan ekonomi belum cukup mendukung kelompok rentan untuk tumbuh dan berkembang.

Jika dikaitkan dengan teori strukturasi Anthony Giddens, dapat dikatakan bahwa individu tidak hanya dibentuk oleh struktur sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertindak dalam struktur tersebut. Namun, ketika struktur—seperti akses terhadap pendidikan, teknologi, dan layanan kesehatan—tidak adil atau timpang, maka ruang gerak individu menjadi terbatas. Dalam konteks ini, struktur ketimpangan menjadi penghambat utama dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Yang paling signifikan dari temuan ini adalah bahwa kesetaraan kesempatan masih jauh dari kenyataan. Meskipun banyak warga memiliki semangat kerja dan keinginan untuk maju, mereka terbentur oleh sistem yang tidak merata. Ketimpangan dalam kesehatan dan pendidikan terbukti menjadi akar dari berbagai masalah sosial lain seperti kemiskinan jangka panjang, keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, hingga lemahnya daya tahan ekonomi rumah tangga.

Oleh karena itu, pembenahan di sektor kesehatan dan pendidikan tidak bisa ditunda lagi. Pemerintah perlu hadir secara aktif dengan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Pendekatan berbasis kebijakan afirmatif atau affirmative policy menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan struktural ini. Di sisi lain, solidaritas sosial antarwarga juga perlu dibangun sebagai kekuatan kolektif untuk saling menopang. Dengan begitu, harapan akan masyarakat yang lebih setara, mandiri, dan sejahtera di Jakarta Barat bukanlah hal yang mustahil, melainkan tujuan yang bisa dicapai secara bersama-sama.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi di Jakarta Barat masih sangat nyata, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, pekerjaan, dan kepemilikan aset. Wawancara dengan tiga narasumber dari latar belakang sosial berbeda menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan rendah menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas sosial mereka.

Pendidikan dan kesehatan muncul sebagai sektor paling mendesak untuk diperbaiki guna menciptakan kesetaraan kesempatan. Selain itu, akses terhadap teknologi dan pekerjaan juga perlu diperluas agar lebih inklusif.

Upaya mengatasi ketimpangan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Rekomendasi mencakup peningkatan kualitas layanan publik, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Langkah ini sejalan dengan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jambi*.
- Dewi, T. R., Botifar, M., & Iskandar, Z. (2023). *Analisis Nilai Marxisme Dan Diskriminasi Kasta Sosial Dalam Novel Jejak Langkah Karya Pramoedya Ananta Toer*. Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Friahmad, a. (2024, 12 23). *Kesenjangan Sosial di Jakarta: Tantangan dan Solusi yang Perlu Diterapkan*. Kumparan.
- Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*.
- Muchaqqi, A., Halkis, M., & Mundayat, A. (2020). Dampak ketimpangan sosial ekonomi terhadap sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (studi kasus di kawasan muara angke). *Ekonomi Pertahanan*, 5(2).
- Praja, R. B., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Ecoplan*, 6(1), 78-86.
- Riantiarno, N. E., Hilman, M. F., & Noer, S. I. (2024, 05 13). *Ketimpangan Jakarta Berjuang Melawan Jurang Ekonomi*. JurnalPost. <https://jurnalpost.com/ketimpangan-jakarta-berjuang-melawan-jurang-ekonomi/68227/#:~:text=Kondisi%20perekonomian%20masyarakat%20sekitar%20Jakarta%20yang%20berjuang,akses%20yang%20lebih%20baik%20ke%20peluang%20ekonomi>.
- Rizki, M. A. (2024). *Pengaruh Kesenjangan Sosial terhadap Stabilitas Ekonomi*. Circle Archive.
- Tisniwati, B. (2012). faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 33-46.

Zhafirah, H. (2024). *Representasi Diskriminasi Kasta Sosial Dalam Film 3Bilal A New Breed Of Hero*. Doctoral dissertation, IAIN Kediri.